

DUKUNGAN DAN IMPLEMENTASI *SOUTH-SOUTH COOPERATION* INDONESIA DALAM  
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN NEGARA BERKEMBANG

**Fahrul Rozy (1117113000060)**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta*

Email: [rozy.fahrul432@gmail.com](mailto:rozy.fahrul432@gmail.com)

**Abstact**

*South South Cooperation (SSC) is a form of development cooperation between developing countries based on the principle of equality, solidarity, and the principle of mutual benefit. Indonesia is one of the member countries of Cooperation which is active as a foreign aid provider for SSC partner countries. Indonesia started the Cooperation since the Asian African Conference 1955 in Bandung.. Nevertheless, there are still many problems in implementing this policy. Not every Indonesian understand about this issue or the need of giving aid to other developing countries while there are still many development problems occurring in our domestic level. This study is aimed to analyze the importance of why Indonesia giving overseas development aid through SSC scheme. Besides that this article is aimed to identify the challange of Indonesia in implementing SSC and examines from another perspective on the impact of Indonesia's foreign assistance on the development of member states of SSC. This paper adopting a qualitative method of analysis. Its finding concludes that the country's involvement is intended to gain political support from developing countries for the country's political interest in international arena and it has given significant contribution for the country's economic development, especially in the regions.*

**Keywords** : *south-south cooperation (SSC), Indonesian Foreign Aid, national interest, soft power.*

**Abstrak**

*South-South Cooperation (SSC) merupakan bentuk kerja sama pembangunan antara negara – negara berkembang yang berlandaskan prinsip, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip saling menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara anggota Kerja Sama yang aktif menjadi pemberi bantuan luar negeri bagi negara-negara mitra SSC. Indonesia memulai kebijakan SSC sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung, yang artinya sudah 65 tahun lebih Indonesia bergelut dengan kebijakan kerjasama selatan-selatan ini. Meskipun demikian, masih ada banyak masalah dalam pengimplementasian kebijakan ini. Tidak semua orang Indonesia memahami isu SSC ini atau perlunya memberikan bantuan ke negara sedang berkembang yang lain sementara masih banyak permasalahan pembangunan di dalam negeri. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa mengapa Indonesia memberikan bantuan luar negeri melalui skema SSC. Selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk*

mengidentifikasi hambatan dan tantangan Indonesia dalam mengimplementasikan SSC, dan memperhitungkan dampak dari bantuan luar negeri Indonesia terhadap perkembangan negara – negara anggota SSC. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan tahun 2020, dengan pengumpulan data di Tangerang Selatan, Banten. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan SSC berdaya guna untuk meraih dukungan bagi kepentingan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan juga bermanfaat banyak bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah.

**Kata kunci** : kerja sama Selatan Selatan (SSC), Bantuan luar negeri Indonesia, kepentingan nasional, *soft power*.

## A. Pendahuluan

Indonesia telah aktif melakukan kebijakan *South-South Cooperation* (SSC) selama kurang lebih 65 tahun sejak dibentuknya pada tahun 1955. Adapun alasan Indonesia turut berperan aktif adalah untuk merealisasikan suatu bentuk kerja sama pembangunan antara negara – negara berkembang yang berlandaskan prinsip solidaritas, kesetaraan (*mutual opportunity*) dan prinsip saling menguntungkan atau *mutual benefit* (Tim Koordinasi Nasional SSCT Indonesia, 2017). Dalam implementasi kebijakan ini, Indonesia memiliki keuntungan lebih dalam realisasinya, sebab peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi middle income country (MIC) dan bagian dari anggota G-20 dapat membantu Indonesia berperan dalam berbagai forum internasional guna mencapai target pembangunan. Salah cara yang ditempuh adalah memberdayakan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan kepada negara berkembang melalui kebijakan *South-South Cooperation* (SSC).

Peran dan kontribusi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dapat dilihat dari berbagai bentuk kerjasama teknik yang dilaksanakan sejak tahun 1981. Kerjasama teknik ini meliputi program-program pelatihan yang diikuti oleh peserta dari negara berkembang, seperti penugasan tenaga ahli Indonesia ke Kamboja, Gambia, dan beberapa negara berkembang lain. Indonesia juga memberikan bantuan peralatan pertanian ke beberapa negara di Afrika, pemberian

beasiswa dan pertukaran kebudayaan di beberapa negara Asia Pasifik. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, jumlah peserta dari negara berkembang yang mengikuti program pelatihan di bidang pertanian dari tahun 1980 sampai tahun 2008 telah mencapai 1.630 orang dan berasal dari sekitar 70 negara di Kawasan Asia (termasuk Asia Timur), Afrika, Pasifik, dan Amerika Latin. Adapun bantuan peralatan meliputi bantuan alat mesin pertanian berat seperti, hand tractor, cangkul, sabit, pompa air, power thresher, dan rice milling ke beberapa negara di kawasan Afrika, Pasifik, dan Asia (Hadi et al., 2010). Lebih jauh, sebagai wujud dari komitmen Indonesia terhadap Kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia juga aktif turut serta untuk ikut dalam forum seperti Global Platform for Disaster Risk Reduction. Dengan segala bantuan luar negeri dan peran aktif Indonesia dalam SSC ini, diharapkan kebijakan ini mampu menjadi alat diplomasi yang ampuh bagi Indonesia dalam bergaul di kawasan regional maupun internasional.

Permasalahan yang saya ambil dalam tulisan ini adalah, bantuan luar negeri memang dapat menjadi alat diplomasi yang efektif dan membantu Indonesia untuk meningkatkan eksistensinya dalam hubungan internasional, tetapi hal ini juga mungkin dapat menjadi kebijakan yang memicu perdebatan karena tidak semua pihak setuju dengan kebijakan memberikan bantuan untuk negara lain. Permasalahan pembangunan masih banyak ditemui oleh masyarakat Indonesia mulai dari

kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang kurang memadai khususnya di wilayah pedalaman di Indonesia. Selama masih ada banyak permasalahan pembangunan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, kebijakan bantuan luar negeri untuk melaksanakan SSC dapat menemui hambatan berupa protes, demonstrasi atau penolakan terkait kebijakan tersebut.

Tulisan ini akan berpedoman pada beberapa pertanyaan penelitian untuk membahas isu mengenai *South-South Cooperation* (SSC). Pertanyaan tersebut adalah Mengapa Indonesia perlu memberikan bantuan luar negeri ke negara yang sedang berkembang khususnya di kawasan Asia Pasifik? Dan apa saja hambatan serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan Kebijakan SSC? Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pandangan baru dalam melihat bantuan luar negeri dalam skema SSC sebagai instrument politik bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam kancah politik global khususnya Asia Pasifik.

## B. Kerangka Pemikiran

Beranjak dari definisi *South-South Cooperation* (SSC) itu sendiri, tidak ada definisi tunggal yang mengungkapkan mengenai apa itu *South-South Cooperation*. Setiap peneliti ataupun organisasi dalam publikasi dan penelitiannya memiliki tafsiran yang berbeda-beda terkait *South-South Cooperation* (SSC). Secara sederhana,

SSC dapat dipahami sebagai hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara-negara sedang berkembang dalam meningkatkan pembangunan. Secara lebih rinci Kakonge menjelaskan SSC sebagai proses dimana dua atau lebih negara sedang berkembang mengejar tujuan pembangunan individu atau kolektif melalui kerjasama berupa pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumberdaya, dan kecakapan teknis (Kakonge, 2014). Definisi dari Kakonge tersebut cukup lengkap untuk memberikan pemahaman apa itu SSC dan dapat dipakai sebagai acuan dalam memahami tulisan ini.

Untuk menganalisis permasalahan yang ada di tulisan ini, penulis menggunakan perspektif liberal-institusionalis sebagai kacamata dalam menelaah kasus yang ada. Perspektif liberal-institusionalis tentunya dilandasi oleh pemikiran-pemikiran liberal yang memandang bahwa sifat manusia pada dasarnya adalah baik yaitu cinta damai, kooperatif, kompetitif, namun kompetisi yang dilakukan dengan cara yang konstruktif, dan melakukan sesuatu berdasarkan suatu alasan bukan hanya emosi untuk menjatuhkan lawan. Perspektif ini memandang manusia secara positif dan dalam mencapai tujuan dengan melakukan kerjasama baik secara kolektif maupun individu. Hal ini juga diyakini dalam melihat negara sebagai entitas yang bisa melakukan kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan dalam negerinya. Dalam tulisannya, Mahbubani berpendapat bahwa dengan kerja-sama antar negara, zero sum game dapat

berubah menjadi win-win game (Public & Review, 2014).

Apabila perspektif ini diaplikasikan dalam memandang fenomena SSC, keputusan Indonesia untuk memberikan bantuan kepada negara sedang berkembang yang lain adalah keputusan yang tepat, karena dengan memberikan bantuan, Indonesia telah melakukan *mutual gain*. Memberikan bantuan tidak hanya memenuhi kepentingan nasional Indonesia saja, tetapi juga memenuhi kepentingan kolektif institusi multilateral di mana Indonesia bergabung sebagai anggota di dalamnya. Memberikan bantuan adalah kepentingan kolektif dari PBB dan juga G20 (Apresian, 2017). Tidak hanya negara penerima bantuan yang merasakan peningkatan dalam hal pembangunan tetapi Indonesia sebagai negara yang memberikan bantuan lebih banyak juga merasakan keuntungan dari memberikan bantuan tersebut.

### C. *Literatur Review*

Dalam *South-South Cooperation* (SSC), Indonesia dianggap memiliki power yang lebih di antara negara negara regional atas kepentingan dan tanggung jawabnya sebagai negara yang turut ikut dalam SSC dengan memberikan bantuan finansial dan program – program (Pujayanti, 2015). Indonesia menaruh komitmennya terhadap SSC dengan cara mencantumkan SSC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak tahun 2010 guna memperkuat peran Indonesia dalam forum kerjasama pembangunan internasional (Abdurachman & Prakoso, 2017). Jika

dibandingkan dengan negara anggota SSC lainnya, bantuan finansial berupa dana dari Indonesia hanya sebesar 10 juta dollar AS, tidak seperti Tiongkok, Brazil India yang menyumbang ratusan juta untuk SSC sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menyumbang dengan jumlah paling kecil (Pujayanti, 2015). Oleh karena itu, bantuan yang diberikan Indonesia cenderung berbentuk bantuan non finansial, seperti bantuan program-program yang menunjukkan kepentingan nasional pada negara negara lain yang berifat karakteristik, politis, dan pencitraan atas kedudukan Indonesia pada saat itu sebagai satu satunya anggota tetap G20 di antara negara negara ASEAN lainnya (Abdurachman & Prakoso, 2017). Pada saat Indonesia aktif dalam memberikan bantuan kepada sesama negara berkembang, Indonesia mempromosikan demokrasi karena keberhasilan Indonesia menjadi negara demokrasi pada tahun 1998 kepada negara negara yang masih dalam proses transisi demokrasi. Selain itu, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia adalah bantuan berupa hibah atau hadiah dan memberikan beberapa pelatihan tenaga kerja bagi negara anggota SSC, seperti tenaga ahli dalam bidang pertanian, perikanan, *good government* dan UKM. Total anggaran pemerintah Indonesia untuk bantuan SSC bernilai sebesar 15,08 juta US Dollar pada tahun 2016 (Tim Koordinasi Nasional SSCT Indonesia, 2016). Terlibatnya Indonesia di dalam SSC, dapat membantu pembangunan negara yang tertinggal, selain itu bantuan yang diberikan oleh Indonesia menjadi

jalan Indonesia untuk berinvestasi dalam dunia politik dan ekonomi, karena dengan SSC, Indonesia dapat menembus pasar produk barang dan jasa dari Indonesia di pasar global (Abdurachman & Prakoso, 2017).

Menurut kedua referensi tersebut, selain sebagai negara penerima bantuan, Indonesia sangat aktif sebagai negara pemberi bantuan, terutama program-program yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tentu, dengan memberikan banyak bantuan tersebut Indonesia juga memiliki kepentingan atas hal itu. Pada jurnal "Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan - Selatan dan Triangular" dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Indonesia untuk SSC juga menguntungkan untuk beberapa aspek bagi Indonesia, baik itu politik dan ekonomi untuk negara Indonesia. Pada jurnal "Kerja Sama Selatan - Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia" juga masih menjelaskan manfaat dan dampak bagi Indonesia atas bantuan yang diberikan oleh Indonesia untuk negara-negara anggota SSC, salah satunya kepentingan politik Indonesia yang mengharuskan politik luar negeri Indonesia kuat atas pelaksanaannya. Kedua jurnal tersebut belum menjelaskan apa dampak atau manfaat yang didapat oleh negara-negara anggota atas bantuan yang diberikan oleh Indonesia.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Kebijakan dan Implementasi Kerja Sama Selatan Selatan di Indonesia**

Sejarah keterlibatan Indonesia dalam *South-South Cooperation* (SSC) dimulai saat Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Pelaksanaan SSC merupakan langkah nyata untuk mewujudkan solidaritas dan penguatan hubungan multilateral di antara negara-negara berkembang untuk mencapai kondisi yang lebih baik serta dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan. Bagi Indonesia, keterlibatan ini merupakan implementasi dari Pembukaan UUD 45 "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Indonesia berupaya mendorong negara-negara berkembang untuk bekerja sama menciptakan peluang pertukaran pengetahuan dan inovasi bagi kemajuan bersama.

Sejalan dengan prinsip Indonesia tersebut, SSC kini lebih mendapat sorotan seiring negara-negara berkembang semakin meraih bobot dalam perekonomian dunia. Suatu definisi standar yang berlaku secara internasional terhadap KSS memang belum ada. Berbagai organisasi dan perorangan memberikan beragam definisi. Beragamnya definisi ini mencerminkan sudut pandang luas atas konsep tersebut. KSS telah menjadi agenda internasional. Perkembangan KSS tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan PBB di dalam membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi keterbelakangannya.

Oleh karena itu, *South-South Cooperation* (SSC) merupakan salah satu

aspek penting dalam mendukung dan menguatkan kerjasama pembangunan, khususnya antar sesama negara berkembang. Secara umum, SSC telah menjadi kerangka penting bagi negara berkembang dalam berbagi informasi, pengalaman dan pengetahuan dalam pembangunan. Sebagai salah satu anggota forum G-20, peran Indonesia di SSC pun berubah seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan mejadikan Indonesia sebagai “*new emerging donors*” di SSC, aritnya Indonesia bukan hanya sekedar menjadi penerima tetapi juga berperan ganda sebagai negara yang memberikan bantuan kepada negara penerima (Abdurachman & Prakoso, 2017).

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Pembangunan, Indonesia berpatokan pada suatu kerangka kebijakan yang tersusun atas tiga pilar utama, yaitu (a) Transfer Teknologi; (b) Perluasan Investasi pada Sektor Swasta, serta (c) Kerjasama Internasional termasuk didalamnya *South-South Cooperation* (SSC). Ketiga pilar tersebut bersifat saling berkaitan satu sama lain terutama dalam konteks meningkatnya status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan sebagai anggota forum G-20 (Kristiyanto, 2011).

Selain itu, untuk meningkatkan komitmennya, Indonesia telah mencantumkan SSC sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, membentuk Tim Koordinasi SSC Indonesia dan menyusun Rencana Induk dan Cetak

Biru SSC. Tim Koordinasi tersebut dirasakan mendesak karena selama ini pelaksanaan SSC dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terpisah dan menjadikan kebijakan implementasi tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh (Pujayanti, 2015).

Pada tahun 2012, keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya ditunjukkan dengan serangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga terkait serta dengan negara-negara mitra pembangunan SSC (Pujayanti, 2015). Kementerian Luar Negeri sebagai *focal point* dalam koordinasi SSC mengidentifikasi prioritas negara-negara calon penerima bantuan teknik yang nantinya dapat dilakukan oleh seluruh Kementerian atau Lembaga terkait. Kementerian ini juga menyusun standard operational procedure (SOP) untuk mekanisme evaluasi program pengembangan kapasitas yang nantinya akan dipakai Indonesia untuk melihat efektivitas bantuan luar negerinya. Pada tanggal 16-19 Oktober 2012 tim Koordinasi KSS dan Triangular Indonesia menyelenggarakan Training for Evaluator Phase I di Yogyakarta. Pada tanggal 30 Nopember - 1 Desember 2012 diselenggarakan pemutakhiran daftar prioritas nasional program bantuan teknik kerjasama Selatan Selatan (Apresian, 2017).

Selain persiapan internal, pemerintah juga telah menyelenggarakan forum internasional, *High Level Meeting*

(HLM) di Bali pada tanggal 10-12 Juli 2012 dengan tema *Toward Country Led Knowledge Hubs*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 200 peserta dari 40 negara dan mitra pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan bidang-bidang yang akan ditekankan dalam promosi SSC, yaitu bidang pembangunan, *good governance* dan bidang ekonomi. Indonesia meyakini bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan keunggulan komparatif di ketiga bidang tersebut. Dalam forum internasional tersebut Indonesia juga *mengumumkan pledge Indonesia* untuk berkontribusi sebesar 1,5 juta USD kepada *South-South Facility* dan *World Bank Institute* (Pujayanti, 2015).

Sesuai dengan laporan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dalam kurun waktu 2000-2012, Indonesia telah berkontribusi sekitar 50 juta dolar AS (Pujayanti, 2015). Catatan analisis dari David Hatch menyebut bahwa dalam kurun waktu 2002-2012, Indonesia telah menyediakan dana bantuan sebesar 45 juta USD untuk negara-negara berkembang lainnya (UNIDO, 2011).

Pada tahun 2016, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam SSC semakin diperkuat, seperti tercantum dalam "Nawa Cita #1" dimana Presiden Joko Widodo menetapkan pelaksanaan SSC sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahannya (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2016):

"... Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia..." (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2016)

Dalam agenda prioritas peran global Indonesia yang ditetapkan Presiden, disebutkan rencana aksi untuk :

"... meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai bagian dari perjuangan membangun kerja sama internasional dan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar, dan saling menguntungkan." (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2016)

Namun demikian, hingga tahun 2016 Indonesia belum memiliki payung hukum secara nasional yang mengatur SSC. Sehingga, untuk menerjemahkan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk Peraturan Presiden tentang SSC (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2016).

Penguatan peraturan dan regulasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan SSC dapat melalui proses administrasi dan dikelola melalui payung hukum yang jelas, akuntabel, komprehensif serta keberlanjutan, dan terintegrasi dengan agenda pembangunan serta politik luar negeri Indonesia.

Usulan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas diprakarsai Kementerian Luar Negeri tahun 2016. Namun demikian, terdapat perubahan judul dari pengusulan awal RPerpres tentang Pembentukan Badan Pemberian Bantuan Teknik (*single agency for technical cooperation*) menjadi RPerpres tentang Pengelolaan SSC. Perubahan fokus pembahasan dalam penyusunan RPerpres tersebut, didasarkan adanya kebutuhan untuk merancang regulasi terkait proses bisnis SSC terlebih dahulu, sebelum diputuskan bentuk kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan bantuan teknik Indonesia.

Pembahasan penyusunan RPerpres tentang Pengelolaan SSC berlanjut pada tahun 2017 dan diupayakan dapat sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (RPP Hibah) (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2016).

### **Dampak Terhadap Negara - Negara Anggota Kerjasama Selatan-Selatan Sebagai Penerima Bantuan Luar Negeri Indonesia**

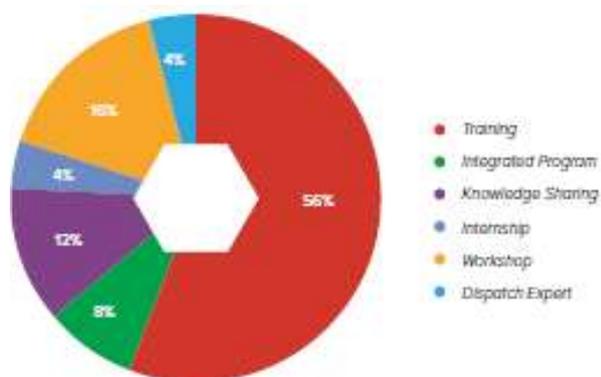
Dalam *Triangular Cooperation and Aid Effectiveness*, Fredelone menjelaskan bahwa semakin majunya perkembangan zaman, maka kerjasama pembangunan internasional semakin meningkat seiring dengan meningkatnya peran-peran negara berpenghasilan menengah. Hal ini

dimaksudkan bukan hanya sebagai penerima bantuan, akan tetapi juga sebagai pemberi bantuan. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia untuk negara-negara berkembang yang berada dalam kawasan kerjasama tersebut biasanya berupa hibah dan berbagai bentuk pelatihan yang diantaranya pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan, *good government* serta UKM. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah mengadakan lebih dari 700 program KSS yang bernilai di atas US\$ 60 juta dengan mitra negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Pasifik Selatan (Pujayanti, 2015).

Selama tahun 2016, Tim Kornas KSST bersama mitra K/L maupun mitra pembangunan telah melaksanakan 51 program kerja sama pembangunan yang dijalankan berdasarkan prinsip *demand driven*, dan sesuai dengan kebutuhan negara penerima bantuan. Dari tahun ke tahun, Tim Kornas SSC berusaha untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program-program guna meningkatkan kualitas output dan outcome program (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2016).

Program pembangunan SSC Indonesia 2016 terdiri dari beberapa bentuk kegiatan, diantaranya adalah Program Pelatihan Keterampilan, Pengiriman Ahli, Sharing Pengetahuan, Lokakarya, Magang, atau kombinasi dari beberapa kegiatan tersebut. Setiap kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dari negara-negara Selatan untuk

membangun bangsa mereka masing-masing. Diagram di bawah ini menunjukkan distribusi program SSC Indonesia tahun 2016 berdasarkan jenis program (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2016):



<sup>7</sup> Data dihitung dari data 50 program yang dapat teridentifikasi

Berkaca dari grafik di atas, terlihat bahwa Program Pelatihan Keterampilan masih menjadi jenis kegiatan yang paling sering dilakukan di bawah KSST Indonesia (56%) ,diikuti dengan Workshop/Lokakarya (16%), Knowledge Sharing/ Sharing Pengetahuan (12%) Integrated Program (8%), kemudian Internship dan Expert Dispatch (4%). Selama pelatihan, kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dalam kelas dan diikuti dengan tinjauan lapangan ke tempat yang relevan (Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, 2016).

Adapun program unggulan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia melalui SSC yang penulis kutip dari laporan tahunan SSC Indonesia 2016 adalah : *Entrepreneurship Boot Camp : International Workshop on Entrepreneurship for Asia Pacific Phase II; International Workshop on*

*Cyber Crime and Digital Forensic for Palestinian Police Officers and International Workshop on Public Order Management for Asia Pacific Countries; OIC Workshop on Vaccine Management; Sharing Best Practices and Experience on Women and Leadership; dan Knowledge Sharing Program for the Egyptian Official Development Assistance (ODA) Management* (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2016).

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Indonesia di era Kepresidenan Joko Widodo, posisi KSST dianggap strategis dalam mengkampanyekan narasi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berhaluan bebas aktif. Melalui KSST, Pemerintah Indonesia dapat mempromosikan kepada dunia kepentingan luar negeri bangsa Indonesia yang bertujuan untuk turut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## E. Kesimpulan

Tulisan ini telah mengkaji bagaimana pengaruh keanggotaan Indonesia di G20 terhadap peran Indonesia dalam *South-South Cooperation* (SSC). Sebagai anggota G20, Indonesia telah mengambil bagian dalam menginisiasi masuknya agenda pembangunan dalam proses G20. Indonesia telah berkontribusi secara aktif dalam mempromosikan bantuan pembangunan internasional salah satunya melalui skema *South-South*

*Cooperation* (SSC) sejak tahun 1981. SSC adalah suatu model kerjasama yang dikembangkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka. Keterlibatan Indonesia dalam pemberian bantuan bagi negara lain merupakan hasil dari sebuah proses yang sangat panjang. Dimulai sebagai penerima bantuan dari negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1960-an, Indonesia kemudian mampu mengembangkan diri melalui proyek-proyek bantuan yang dianggap sukses diimplementasikan di Indonesia. Kesuksesan dapat dilihat dari perkembangan Indonesia dalam beberapa sektor. Selain itu, kapasitas Indonesia juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dimana hal tersebut ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan Indonesia.

Adapun dampak dari bantuan yang diberikan oleh Indonesia terhadap negara-negara Asia yang tergabung dalam Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Dalam Kerja Sama Selatan Selatan, Indonesia telah berkontribusi secara aktif dengan mengadakan lebih dari 700 program sebagai bentuk bantuan, bantuan yang diberikan Indonesia kebanyakan berupa pelatihan-pelatihan ataupun materi. Dari bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia tentu tentu berdampak baik bagi negara penerima bantuan, seperti program unggulan SSC berupa kegiatan workshop "*Sharing Best Practices and Experience on Women and Leadership*" dan "*OIC Workshop on Vaccine Management*" yang telah diadakan oleh Indonesia dan dari

workshop tersebut banyak peserta yang hadir dari berbagai negara yang tergabung ke dalam Kerja Sama Selatan Selatan mendapatkan informasi, ketrampilan dan pengetahuan baru yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh peserta di negara asalnya. Bantuan finansial yang diminimalisir Indonesia selain karena kemampuan bantuan dana Indonesia yang belum sebesar negara-negara donor lain seperti China, India dan Afrika Selatan, permasalahan pembangunan masih banyak ditemui oleh masyarakat Indonesia mulai dari kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang kurang memadai khususnya di wilayah pedalaman menyebabkan Indonesia lebih mengedepatkan bantuan yang sifatnya memberdayakan masyarakat penerima bantuan luar negeri tersebut. Hal ini merupakan kelebihan dari sifat bantuan Indonesia yang meminimalisir dampak negatif berupa membuka kemungkinan negara penerima bantuan menjadi ketergantungan terhadap bantuan finansial yang masuk ke dalam negaranya.

#### Daftar Pustaka :

- Abdurachman, B., & Prakoso, B. M. (2017). Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1(1), 20–34.
- Apresian, S. R. (2017). Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2),

189.

<https://doi.org/10.26593/jihi.v12i2.2653.189-203>

Hadi, S., Bandoro, A. B., Darmastuti, S., Z., I. R., Yudhistira, G., & Syarip, R. (2010). *Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Laporan Akhir dan Policy Paper ( Bahasa Indonesia ) Agustus 2010*.

[http://open\\_jicareport.jica.go.jp/pdf/12025904.pdf](http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12025904.pdf)

Kakonge, J. O. (2014). The Evolution of South-South Cooperation : A Personal Reflection. *Global Policy, July*.  
<http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Kagone - The Evolution of South-South Cooperation, A Personal Reflection 07.14.pdf>

Kristiyanto. (2011). Peran Kementrian Keuangan dalam Pengembangan KSST Indonesia 2015. *Kemenkeu: Pusat Kebijakan Regional Dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal*.

Public, I., & Review, M. (2014). *M AHBUBANI, K. ( 2013 ). THE GREAT CONVERGENCE : A SIA ,. 15(2013), 173–176*.

Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia (South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia). *Jurnal Politika*, 6(1), 63–86.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jp.v6i1.300>

Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan. (2016). Laporan Tahunan SSC Indonesia. *Indonesia South-South Cooperation*, 37.

Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)*

*Indonesia 2016*.

<https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/7-newsletter/229-laporan-tahunan-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-ksst-indonesia-2016>

Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia. (2017). *Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia*.  
<https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/7-newsletter/219-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-indonesia>

UNIDO. (2011). *TRADE CAPACITY BUILDING --- Resource Guide*.  
[https://www.tcbresourceguide.org/vol2/bilateral\\_services/south-south/indonesia.html](https://www.tcbresourceguide.org/vol2/bilateral_services/south-south/indonesia.html)